

PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG DI COP 28: ANALISIS PERSPEKTIF MARXISME LINGKUNGAN

Ali Zahid Habibullah¹, Satriya Wibawa², Ghiyats Akmaluddin³

^{1,2} Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM. 21 Jatinangor, 45363

³ Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jl. Pd. Labu Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

Email: zahid@unpad.ac.id¹; satriya.wibawa@unpad.ac.id²; ghiyatsakmaluddin@gmail.com³

Submitted: 24-11-2025; Accepted: 24-01-2026; Published: 25-01-2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Indonesia dalam COP28 melalui perspektif Marxisme Lingkungan, guna mengkaji kontradiksi posisinya dalam transisi energi global. Meski menyatakan komitmen ambisius pengurangan emisi dan NDC, Indonesia menghadapi paradoks akibat dependensi struktural pada batubara (62% pembangkitan listrik) dan kebutuhan pendanaan transisi yang masif (hingga USD 3,5 triliun). Dengan metode kualitatif melalui analisis dokumen resmi COP28, laporan JETP, data Ember Energy dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), serta literatur kebijakan energi Indonesia, penelitian mengungkap bahwa Indonesia menempati contradictory class position dengan menanggung beban transisi yang diakibatkan industrialisasi negara maju tanpa akses proporsional terhadap pendanaan dan teknologi. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, yang didominasi pinjaman (hanya 1,37% hibah), mengonfirmasi logika kapitalis global yang mempertahankan struktur eksploitasi dalam mengelola krisis iklim. Dominasi korporasi fosil dalam negosiasi COP 28, ditunjukkan oleh partisipasi lebih dari 2.000 pelobi dan penunjukan CEO ADNOC sebagai presiden konferensi, memperkuat temuan ini. Disimpulkan bahwa tanpa transformasi struktural sistem ekonomi global, Indonesia dan negara berkembang akan tetap terjebak dalam posisi subordinat dalam diplomasi iklim dan transisi energi.

Kata kunci: COP28; Indonesia; Marxisme Lingkungan; Transisi Energi; Kapitalisme Global; JETP

ABSTRACT

This research analyzes Indonesia's role at COP28 through an environmental Marxist lens, examining its paradoxical position within the global energy transition. While pledging ambitious emissions reductions and an NDC target, Indonesia faces a structural contradiction between its coal dependency (62% of electricity) and immense financing needs (up to USD 3.5 trillion). Utilizing a qualitative documentary analysis, the study finds Indonesia occupies a contradictory class position, it bears the transition burden from developed nations' industrialization yet lacks proportional access to finance and technology. The USD 20 billion Just Energy Transition Partnership (JETP), predominantly composed of loans (only 1.37% grants), exemplifies how the global capitalist system manages the climate crisis while reinforcing exploitative structures. The pervasive influence of fossil capital in COP28 negotiations, evidenced by over 2,000 industry lobbyists and the ADNOC CEO's presidency, confirms the dominance of corporate interests in climate diplomacy. The research concludes that without a structural transformation of the global economic order, Indonesia and other developing nations will remain subordinated within the global energy transition.

Key words: COP28; Indonesia; Environmental Marxism; Energy Transition; Global Capitalism; JETP

PENDAHULUAN

Krisis iklim global telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia di abad ke-21, dengan dampak yang semakin nyata berupa peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta degradasi ekosistem yang mengancam keberlangsungan hidup jutaan manusia di seluruh dunia. Conference of the Parties ke-28 (COP28) dari United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, dari 30 November hingga 13 Desember 2023 merupakan upaya multilateral terbaru untuk menghadapi urgensi krisis ini (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2023). Konferensi yang dihadiri sekitar 85.000 peserta dari hampir 200 negara ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk komitmen untuk pertama kalinya dalam sejarah COP menyebutkan secara eksplisit pergeseran global dari bahan bakar fosil sebagai bagian dari inventarisasi global (Bourzac, 2024).

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor energi berbasis fosil menghadapi dilema kompleks dalam konteks COP28. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan komitmen ambisius dengan mengklaim telah berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 60 persen dan memperbarui target kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) dengan tujuan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,8 persen secara mandiri, atau hingga 60 persen dengan dukungan internasional (Insivia Partners, 2025). Di sisi lain, realitas ekonomi politik Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara yang pada tahun 2023 menyumbang 62 persen dari total pembangkitan listrik nasional yang mencapai 217 TWh dari total 346 TWh permintaan listrik (Ember Energy, 2024). Ketergantungan struktural ini menciptakan paradoks di mana Indonesia tampil sebagai pemimpin transisi energi di forum internasional namun menghadapi kendala fundamental dalam implementasi komitmen tersebut.

Data terkini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi Indonesia dalam transisi energi. Meskipun Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada tahun

2025, realisasi hingga tahun 2023 baru mencapai 13,1 persen atau 14,5 persen jika memasukkan semua sumber terbarukan termasuk geothermal, bioenergy, solar, wind, dan hydro (Institute for Essential Services Reform, 2024). Lebih mengkhawatirkan lagi, draf revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sedang dibahas justru menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23 persen menjadi 17-19 persen pada tahun 2025, dan dari 26 persen menjadi 19-21 persen pada tahun 2030, menunjukkan gap yang semakin melebar antara retorika dengan implementasi kebijakan (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2024). Dalam lima tahun terakhir dari 2018 hingga 2023, Indonesia hanya menambah 3,3 GW kapasitas energi terbarukan, sementara kapasitas bahan bakar fosil meningkat 26 GW, membawa total kapasitas fosil menjadi 80 GW atau 86 persen dari total kapasitas pembangkitan 93 GW (Ember Energy, 2024).

Estimasi kebutuhan pendanaan untuk transisi energi Indonesia sangat besar dan mencerminkan tantangan struktural yang dihadapi negara berkembang. Berbagai studi memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi antara Rp 3.500 triliun hingga USD 3,5 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 43,2 persen pada tahun 2030 dan mencapai net zero emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat (Resosudarmo, Effendi, & Rezki, 2023). Just Energy Transition Partnership (JETP) yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali November 2022 menjanjikan pendanaan USD 20 miliar dari negara-negara G7 dan mitra internasional untuk mendukung transisi energi Indonesia. Namun jumlah ini jauh dari kebutuhan aktual, dan yang lebih problematis adalah bahwa hanya USD 295 juta atau 1,37 persen dari total JETP yang berbentuk hibah, sementara sisanya adalah pinjaman yang berpotensi menambah beban utang Indonesia (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2024).

Kontradiksi ini menjadi semakin jelas ketika kita memeriksa posisi Indonesia dalam negosiasi COP 28. Indonesia tidak menandatangani deklarasi global tentang energi terbarukan dan efisiensi energi di COP 28, dan dalam perumusan hasil konferensi, Indonesia tidak memberikan dukungan penuh terhadap seruan penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara cepat (phasing out), melainkan mendorong pendekatan transisi yang bertahap dengan

mempertimbangkan kondisi dan kapasitas nasional masing-masing negara (Putri, Molasy, & Soelistijiono, 2025). Posisi ini mencerminkan realitas bahwa lebih dari 85 persen pasokan energi primer Indonesia masih berasal dari bahan bakar fosil, dan sektor batu bara menyumbang pendapatan ekspor signifikan bagi negara, meningkat dari 356 juta ton pada tahun 2018 menjadi 518 juta ton pada tahun 2023 dengan nilai ekspor berkisar antara USD 14 miliar hingga USD 46 miliar meskipun nilainya menurun 26 persen dari tahun 2022 ke 2023 (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024).

Dalam perspektif Marxisme lingkungan, situasi yang dihadapi Indonesia di COP 28 bukan semata-mata masalah teknis tentang kapasitas atau ketersediaan teknologi, melainkan merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme global. Karl Marx dan Frederick Engels dalam karya-karya mereka telah memperingatkan bahwa hubungan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan dari mode produksi yang dominan dalam masyarakat. Engels dalam "The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man" mengingatkan bahwa manusia sama sekali tidak menguasai alam seperti menaklukkan orang asing, seperti seseorang yang berdiri di luar alam, tetapi bahwa kita sebagai umat manusia, dengan daging, darah, dan otak, adalah milik alam, hidup di tengah-tengahnya, dan bahwa semua penguasaan kita atasnya terdiri dari fakta bahwa kita memiliki keuntungan dari semua makhluk lain untuk dapat mempelajari hukum-hukumnya dan menerapkannya dengan benar (Engels, 2007).

Peringatan dari perspektif ini sangat relevan dalam konteks krisis iklim kontemporer di mana kecepatan perubahan iklim telah melampaui kemampuan adaptasi biodiversitas dan sistem sosial manusia. Namun lebih penting lagi, Marxisme lingkungan mengidentifikasi bahwa sistem ekonomi kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi alam tetapi juga menciptakan struktur ketimpangan global di mana negara-negara berkembang seperti Indonesia diposisikan sebagai pemasok sumber daya alam dan penerima dampak negatif dari industrialisasi yang sebagian besar dilakukan oleh negara-negara maju (Williams, 2010). Dalam sistem ini, bahkan upaya mengatasi krisis iklim melalui mekanisme seperti COP 28 tetap beroperasi dalam logika kapitalis yang mengkomodifikasi segala aspek kehidupan

termasuk polusi itu sendiri melalui skema perdagangan karbon dan mekanisme pasar lainnya (Ahmed, Shah, & Saleem, 2023).

Kontroversi yang muncul di COP 28 semakin memperkuat analisis Marxis tentang dominasi kepentingan kapitalis dalam diplomasi iklim global. Pada November 2023, Centre for Climate Reporting (CCR) membocorkan dokumen lebih dari 150 halaman yang menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab beserta Sultan Al Jaber, Presiden COP28 yang juga menjabat sebagai CEO Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), telah merencanakan untuk memanfaatkan pertemuan COP28 untuk mempromosikan kesepakatan bisnis minyak dan gas nasional (Centre for Climate Reporting, 2023). Dokumen ini berisi catatan briefing meeting tim COP28 dengan Al Jaber dari Juli hingga Oktober 2023, dan telah diverifikasi kebenarannya oleh BBC melalui kerja sama dengan CCR. Lebih mengkhawatirkan lagi, lebih dari 2.000 delegasi dari lobi industri bahan bakar fosil hadir di COP 28, jumlah yang lebih banyak dari gabungan delegasi 10 negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (Centre for Climate Reporting, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran Indonesia sebagai negara berkembang dalam COP 28 melalui perspektif Marxisme lingkungan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana posisi Indonesia mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme global, bagaimana mekanisme seperti JETP tetap mempertahankan hubungan eksploitatif antara negara maju dengan negara berkembang, serta bagaimana kontroversi di COP 28 membuktikan bahwa kepentingan korporasi besar masih mendominasi agenda transisi energi global. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana peran Indonesia sebagai negara berkembang di COP 28 mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme global dari perspektif Marxisme lingkungan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk menganalisis peran Indonesia dalam COP28 melalui perspektif Marxisme lingkungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan

menginterpretasikan fenomena sosial dan politik yang kompleks terkait dengan diplomasi iklim, ketimpangan global, dan sistem kapitalisme melalui analisis mendalam terhadap data-data tekstual dan dokumenter. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori. Pertama, dokumen resmi terkait COP28 termasuk Joint Statement on Climate, Nature, and People yang dirilis oleh UNFCCC, deklarasi dan kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi, serta laporan resmi dari panitia COP28. Kedua, dokumen kebijakan Indonesia yang mencakup laporan pencapaian Indonesia di COP28, draf revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN), dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) untuk JETP, serta Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan. Ketiga, laporan dan publikasi dari organisasi internasional seperti World Resources Institute (WRI), International Energy Agency (IEA), Ember Energy, Institute for Essential Services Reform (IESR), serta lembaga riset dan think tank lainnya yang menganalisis kebijakan energi dan iklim Indonesia.

Keempat, dokumen bocoran yang diungkapkan oleh Centre for Climate Reporting (CCR) dan BBC tentang keterlibatan industri bahan bakar fosil dalam COP28, termasuk catatan meeting internal dan email tim COP28. Kelima, literatur akademis dari jurnal-jurnal peer-reviewed yang membahas tentang Marxisme lingkungan, kritik terhadap diplomasi iklim global, political economy of energy transition, serta studi kasus tentang negara berkembang dalam negosiasi iklim internasional. Keenam, artikel berita dan analisis dari media massa terpercaya yang memberikan informasi terkini tentang perkembangan kebijakan energi Indonesia, implementasi JETP, serta dinamika politik iklim global.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Untuk literatur akademis, peneliti menggunakan basis data seperti Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan Web of

Science dengan kata kunci pencarian yang mencakup "COP28", "Indonesia climate policy", "environmental Marxism", "just energy transition", "global capitalism climate change", "coal dependency developing countries", dan kombinasi kata kunci lainnya yang relevan. Untuk dokumen kebijakan dan laporan organisasi internasional, peneliti mengakses portal resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNFCCC, WRI, IEA, Ember, IESR, serta website organisasi internasional terkait lainnya. Untuk berita dan analisis terkini, peneliti menggunakan mesin pencari dengan fokus pada publikasi dari tahun 2023-2024 untuk memastikan aktualitas informasi.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, content analysis terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola yang muncul, serta kontradiksi antara retorika dengan praktik kebijakan. Kedua, critical discourse analysis untuk mengungkap asumsi-asumsi ideologis dan struktur kekuasaan yang tersembunyi dalam dokumen kebijakan dan negosiasi COP28. Ketiga, analisis komparatif antara komitmen Indonesia di COP28 dengan realitas implementasi kebijakan energi domestik untuk mengidentifikasi gap antara deklarasi internasional dengan tindakan konkret. Keempat, analisis kuantitatif deskriptif terhadap data statistik terkait produksi energi, emisi karbon, pendanaan transisi energi, dan indikator-indikator lain yang relevan untuk memberikan gambaran faktual tentang kondisi energi Indonesia.

Kerangka analisis Marxisme lingkungan digunakan sebagai lensa teoretis untuk menginterpretasikan temuan-temuan penelitian. Konsep-konsep kunci seperti eksploitasi, alienasi, komodifikasi alam, ketimpangan struktural global, serta kontradiksi kapitalisme hijau diterapkan untuk memahami bagaimana posisi Indonesia di COP28 mencerminkan dinamika sistem kapitalisme global. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Keterbatasan penelitian ini terletak pada reliance terhadap data sekunder tanpa pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung, namun richness dan diversity

dari sumber-sumber pustaka yang digunakan memberikan basis yang solid untuk analisis yang komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu

Studi-studi terkini mengenai diplomasi iklim dan peran negara berkembang mengungkap kompleksitas dan dilema yang mendalam. Penelitian oleh Bourzac (2024), Darby, Hammond, dan Wu (2024), dan Hamilton et al. (2024) secara konsisten menyoroti pencapaian simbolis forum seperti COP28—seperti pengakuan terhadap bahan bakar fosil dan pendirian Loss and Damage Fund—serta kesenjangan implementasi yang akut, terutama dalam pendanaan dan mekanisme dukungan bagi negara-negara berkembang. Kesenjangan ini terjadi di tengah tekanan transisi yang intens.

Secara khusus, negara berkembang menghadapi paradoks yang signifikan. Di satu sisi, mereka didorong untuk melakukan transisi energi yang ambisius (Yu et al., 2024; Asif, Amin, Shabbir, & Song, 2024). Di sisi lain, mereka terbebani oleh realitas struktural, seperti ketergantungan pada energi fosil (Resosudarmo et al., 2023; Putri et al., 2025), keterbatasan teknologi, dan fase pertumbuhan ekonomi yang masih terkait dengan peningkatan emisi, seperti yang dijelaskan dalam revisi Kerangka Kuznets Lingkungan oleh Chopra, Rehman, Yadav, dan Bhardwaj (2024). Studi kasus Indonesia (Situmorang, Amin, & Ritonga, 2025; Putri et al., 2025) memperjelas bahwa komitmen global sering terhambat oleh kendala birokrasi, konflik kepentingan domestik, dan kebutuhan untuk pendekatan bertahap yang realistis.

Untuk memahami akar ketimpangan dalam transisi energi ini, beberapa sarjana menawarkan perspektif kritis. Kajian Ahmed et al. (2023) dan Williams (2010) mengenai Marxisme dan lingkungan memberikan lensa teoretis yang kuat. Mereka berargumen bahwa krisis iklim dan dinamika diplomasi internasional yang tidak setara merupakan produk dari sistem kapitalis global, yang mengkomodifikasi alam dan mempertahankan hubungan eksploitatif. Perspektif ini membantu menjelaskan contradictory class position negara berkembang, yang harus menanggung beban transisi akibat emisi historis negara maju, sementara tetap berada

dalam struktur ekonomi global yang membatasi akses mereka terhadap sumber daya dan teknologi yang adil.

Kesepakatan COP 28 dan Komitmen Indonesia

Conference of the Parties ke-28 yang berlangsung di Dubai menghasilkan sejumlah kesepakatan yang secara retorik menunjukkan komitmen global yang kuat untuk mengatasi krisis iklim. Salah satu pencapaian paling signifikan adalah konsensus di antara hampir 200 negara untuk secara bertahap beralih dari bahan bakar fosil dalam sistem energi secara teratur dan merata, dengan tujuan mencapai emisi nol pada tahun 2050 (Bourzac, 2024). Kesepakatan ini menandai pertama kalinya dalam sejarah COP bahwa bahan bakar fosil secara eksplisit diakui sebagai penyebab utama perubahan iklim. Secara bersamaan, 50 perusahaan minyak dan gas besar yang mencakup hampir setengah dari produksi bahan bakar fosil global berkomitmen untuk mencapai emisi metana yang mendekati nol dari produksi gas alam pada tahun 2030 (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2023).

Joint Statement on Climate, Nature, and People yang dirilis oleh UNFCCC menekankan integrasi upaya mitigasi, adaptasi, dan konservasi keanekaragaman hayati dengan menyelaraskan tiga instrumen kebijakan nasional inti: Nationally Determined Contributions (NDC), National Adaptation Plans (NAP), dan National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAP) (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2023). Di sektor energi terbarukan, 123 negara menyetujui komitmen global untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan global menjadi setidaknya 11.000 GW pada tahun 2030, serta meningkatkan tingkat peningkatan efisiensi energi tahunan global dari sekitar 2 persen menjadi lebih dari 4 persen pada tahun yang sama (Acen et al., 2024).

COP28 juga menandai operasionalisasi resmi Loss and Damage Fund yang bertujuan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang paling rentan terhadap bencana terkait iklim. Dana ini menerima janji awal sebesar USD 792 juta dengan kontribusi utama dari Uni Emirat Arab dan Jerman masing-masing USD 100 juta, Inggris sebesar 40 juta poundsterling, Amerika Serikat USD 17,5 juta, dan Jepang USD 10 juta (Darby et al., 2024). Namun jumlah ini masih

sangat jauh dari perkiraan kebutuhan USD 290-580 miliar per tahun yang diperlukan pada tahun 2030 untuk mengatasi kerugian dan kerusakan akibat iklim di negara-negara berkembang, menunjukkan gap yang sangat besar antara komitmen dengan kebutuhan aktual (Hamilton et al., 2024).

Indonesia menunjukkan sejumlah pencapaian dalam implementasi hasil COP28, khususnya dalam sektor kehutanan dan konservasi laut. Berdasarkan laporan World Resources Institute, Indonesia berhasil menurunkan kehilangan hutan primer sebesar 65 persen sejak tahun 2015 (World Resources Institute, 2024). Keberhasilan ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah seperti moratorium izin baru di kawasan hutan primer dan gambut, restorasi ekosistem gambut, serta penguatan sistem pencegahan kebakaran hutan. Sebagai bentuk pengakuan atas capaian tersebut, Indonesia menerima kontribusi pendanaan sebesar USD 100 juta dari Norwegia dalam skema results-based payment, serta menjalin kerja sama trilateral pengelolaan hutan tropis dengan Brasil dan Republik Demokratik Kongo (Indonesia secures climate collaborations at COP28, inking milestone agreements, 2023).

Dalam sektor energi, Indonesia telah mempersiapkan 660 Megawatt pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai bagian dari komitmen transisi energi dalam kerangka Just Energy Transition Partnership (JETP), meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pendanaan dan infrastruktur yang signifikan (Institute for Essential Services Reform, 2024). Indonesia juga memperbarui target kontribusi nasional dalam Paris Agreement dengan komitmen penurunan emisi 31,8 persen secara mandiri atau hingga 60 persen dengan dukungan internasional, terutama melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Insivia Partners, 2025).

Analisis Kebijakan Energi Indonesia Pasca-COP 28

Namun di balik pencapaian dan komitmen yang ambisius tersebut, terdapat sejumlah catatan kritis terkait konsistensi dan keseriusan kebijakan energi domestik Indonesia pasca-COP 28. Salah satu sorotan utama adalah keputusan Indonesia untuk tidak menandatangani deklarasi global tentang energi terbarukan dan efisiensi energi di COP 28, yang menimbulkan keraguan terhadap

keseriusan pencapaian target NZE (Putri et al., 2025). Lebih problematis lagi, draf revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang sedang dibahas justru menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23 persen menjadi 17-19 persen pada tahun 2025, dan dari 26 persen menjadi 19-21 persen pada tahun 2030 (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2024).

Data aktual menunjukkan bahwa hingga tahun 2023, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 13,1 persen atau 14,5 persen jika memasukkan semua sumber terbarukan, masih sangat jauh dari target tahunan sebesar 17,9 persen apalagi 23 persen (Institute for Essential Services Reform, 2024). Dalam lima tahun terakhir dari 2018 hingga 2023, Indonesia hanya menambah 3,3 GW kapasitas energi terbarukan dengan rincian bioenergy 1,3 GW, hydropower 1 GW, solar 0,5 GW, geothermal 0,5 GW, dan wind hanya 0,01 GW. Sementara itu dalam periode yang sama, Indonesia menginstalasi tambahan 26 GW kapasitas bahan bakar fosil, membawa total kapasitas fosil menjadi 80 GW atau 86 persen dari total kapasitas pembangkitan 93 GW pada tahun 2023 (Ember Energy, 2024).

Ketergantungan struktural Indonesia terhadap batu bara menciptakan hambatan fundamental dalam transisi energi. Pada tahun 2023, batu bara berkontribusi 62 persen atau 217 TWh dari total pembangkitan listrik 346 TWh (Ember Energy, 2024). Pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara menyumbang sekitar 35 persen dari total emisi Indonesia pada tahun 2020, menjadi sumber emisi terbesar kedua setelah deforestasi (Resosudarmo et al., 2023).

Dari perspektif ekonomi politik, batu bara memiliki insentif ekonomi yang sangat kuat bagi Indonesia. Ekspor batu bara Indonesia meningkat steady dari 356 juta ton pada tahun 2018 menjadi 518 juta ton pada tahun 2023, dengan nilai ekspor berkisar antara USD 14 miliar hingga USD 46 miliar meskipun nilainya menurun 26 persen dari tahun 2022 ke 2023 karena penurunan harga komoditas global (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2024).

Estimasi kebutuhan pendanaan untuk transisi energi Indonesia mencapai angka yang sangat besar. Berbagai studi memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi antara Rp 3.500 triliun hingga USD 3,5 triliun untuk mencapai target pengurangan emisi sebesar 43,2 persen pada tahun 2030 dan mencapai net zero emissions pada

tahun 2060 (Resosudarmo et al., 2023). Just Energy Transition Partnership yang diluncurkan pada KTT G20 di Bali November 2022 menjanjikan pendanaan USD 20 miliar dari negara-negara G7 dan mitra internasional. Namun analisis terhadap komposisi JETP menunjukkan problematika yang serius: hanya USD 295 juta atau 1,37 persen dari total JETP yang berbentuk hibah, sementara USD 10 miliar berbentuk pinjaman dan USD 10 miliar lainnya adalah investasi swasta yang tentu saja mengharapkan return (Institute for Energy Economics and Financial Analysis, 2024).

Analisis Marxisme Lingkungan: Ketimpangan Struktural Global

Dalam perspektif Marxisme lingkungan, situasi yang dihadapi Indonesia di COP28 bukan sekadar masalah teknis atau kapasitas tetapi merupakan manifestasi dari ketimpangan struktural yang berakar pada sistem kapitalisme global. Karl Marx dan Frederick Engels telah mengidentifikasi bahwa sistem kapitalis tidak hanya mengeksploitasi tenaga kerja manusia tetapi juga mengeksploitasi alam dengan cara yang tidak berkelanjutan (Engels, 2007).

Teori Marxisme memandang eksploitasi yang terjadi tidak hanya antara manusia dengan alam, tetapi telah melebar sampai eksploitasi yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Sistem ekonomi kapitalis telah mengalienasi manusia dari alam dengan memprivatisasi daratan dan membuat segala produk menjadi komoditi, bahkan polusi yang dihasilkan itu sendiri melalui mekanisme seperti perdagangan karbon (Williams, 2010).

Menurut Williams (2010), jika kita menganut gaya hidup politik tertentu, maka kita akan dipersepsikan seperti apa yang diinginkan oleh elite korporat dan politik, yaitu sebagai konsumen daripada produsen. Maka dari itu dapat dilihat bahwa Indonesia berada dalam contradictory class position, berperan sebagai negara pekerja dalam sistem global namun sekaligus mencoba masuk dalam lingkaran elite dengan menegosiasikan peran sebagai pemimpin transisi energi.

Loss and Damage Fund yang digagas di COP 28 dengan pendanaan awal hanya USD 792 juta padahal kebutuhan aktual diperkirakan USD 290-580 miliar per tahun pada 2030 menunjukkan bagaimana sistem global kapitalistik mengelola

krisis iklim dengan tetap mempertahankan struktur yang menguntungkan kelas kapitalis global (Darby et al., 2024; Hamilton et al., 2024).

Kontroversi COP28: Dominasi Kepentingan Korporasi

Kontroversi yang muncul di COP 28 semakin membuktikan analisis Marxis tentang dominasi kepentingan korporasi dalam diplomasi iklim global. Pada November 2023, Centre for Climate Reporting (CCR) bekerja sama dengan BBC membocorkan dokumen lebih dari 150 halaman yang berisi catatan briefing meeting tim COP28 dengan Sultan Al Jaber dari Juli hingga Oktober 2023 (Centre for Climate Reporting, 2023). Dokumen ini menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab beserta Al Jaber yang merupakan CEO Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sekaligus Presiden COP28, mempunyai rencana untuk memanfaatkan pertemuan terkait COP 28 untuk mempromosikan kesepakatan bisnis minyak dan gas nasionalnya.

Selain dokumen yang bocor, kontroversi lain yang muncul adalah lobi industri bahan bakar fosil yang sangat masif. COP 28 memuat lebih dari 2.000 delegasi dari lobi industri bahan bakar fosil, jumlah yang lebih banyak dari gabungan delegasi 10 negara paling rentan terhadap dampak perubahan iklim (Centre for Climate Reporting, 2023). Dari perspektif Marxisme, keterlibatan aktor ekonomi besar dalam diplomasi iklim seperti kasus Presiden COP 28 yang juga menjabat CEO perusahaan minyak nasional menyoroti bagaimana kepentingan kapitalis tetap mendominasi ruang negosiasi iklim global. Para pemikir Marxisme telah sampai pada kesimpulan bahwa kapitalisme adalah dalang dari kerusakan alam yang telah terjadi di seluruh dunia (Ahmed et al., 2023). Sistem kapitalis telah mengalienasi manusia dari alam dan menjadikan seluruh unsur kehidupan termasuk udara bersih dan emisi karbon sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Williams, 2010).

Solusi dan Rekomendasi

Sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki posisi yang dapat ditingkatkan jika dimanfaatkan dan diregulasikan dengan baik. Ketergantungan Indonesia pada batu bara sebagai komoditi dapat dijadikan titik kekuatan daripada kelemahan. Indonesia membutuhkan regulasi yang

ketat untuk memastikan bahwa negara ini mendapatkan apa yang pantas didapatkan setelah membuat kesepakatan dengan negara-negara maju yang berinvestasi dan membeli dari Indonesia.

Regulasi yang ditetapkan harus memastikan bahwa negara maju tidak akan memanfaatkan Indonesia untuk kepentingannya sendiri dengan cara memberikan timbal balik yang sepadan dengan apa yang diberikan. Salah satu contoh yang dapat diterapkan adalah memberikan teknologi terbaru yang dapat dimanfaatkan untuk transisi energi. Transfer teknologi ini harus bersifat genuine dan tidak hanya sekadar lisensi yang masih membuat Indonesia bergantung pada negara maju untuk maintenance dan pengembangan.

Regulasi yang menyatakan timbal balik yang sepadan juga dapat memberikan pendanaan yang cukup untuk perkembangan Indonesia dalam hal pengolahan alam dan upaya perbaikannya. Indonesia harus menegosiasikan bahwa bantuan untuk transisi energi tidak boleh dominan berbentuk pinjaman seperti yang terjadi dalam JETP di mana hanya 1,37 persen berbentuk hibah. Struktur pendanaan harus lebih adil dengan porsi hibah yang lebih besar mengingat krisis iklim sebagian besar disebabkan oleh industrialisasi negara-negara maju.

Jika regulasi yang ketat dapat diterapkan, maka tempat Indonesia dalam sistem ekonomi global yang bergantung pada alam dapat berpindah dari konsumen menjadi produsen, di mana Indonesia tidak lagi bergantung pada satu sumber daya alam sebagai bahan bakar tetapi juga dapat turut mencapai target transisi energi. Indonesia perlu membangun kapasitas domestik dalam teknologi energi terbarukan sehingga tidak selamanya bergantung pada transfer teknologi dari negara maju.

Lebih fundamental lagi, Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya perlu mendorong reformasi struktural dalam arsitektur keuangan dan governance global terkait iklim. Ini termasuk memperjuangkan mekanisme pendanaan yang lebih adil dalam UNFCCC, reformasi institusi keuangan multilateral seperti World Bank dan IMF agar lebih responsif terhadap kebutuhan negara berkembang, serta penguatan solidaritas South-South cooperation untuk mengurangi dependensi pada negara maju.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Indonesia sebagai negara berkembang di COP 28 mencerminkan ketimpangan struktural yang mendalam dalam sistem kapitalisme global. Meskipun COP 28 menghasilkan sejumlah kesepakatan penting termasuk pengakuan eksplisit pertama kalinya terhadap bahan bakar fosil sebagai penyebab utama perubahan iklim, realitas implementasi menunjukkan bahwa beban transisi energi tetap tidak dibagi secara adil. Indonesia dengan komitmen ambisius pengurangan emisi 60 persen dan target NDC 31,8 persen menghadapi paradoks fundamental antara dependensi pada batu bara yang menyumbang 62 persen pembangkitan listrik dengan kebutuhan pendanaan transisi energi yang mencapai Rp 3.500 triliun hingga USD 3,5 triliun.

Dari perspektif Marxisme lingkungan, posisi Indonesia menggambarkan contradictory class position di mana negara berkembang dipaksa berperan sebagai pekerja dalam sistem global yang menanggung dampak eksploitasi alam namun tidak memperoleh akses proporsional terhadap sumber daya untuk mengatasi krisis tersebut. Just Energy Transition Partnership yang menjanjikan USD 20 miliar ternyata hanya memiliki 1,37 persen komponen hibah sementara sisanya adalah pinjaman dan investasi swasta, menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan iklim global tetap mempertahankan struktur eksploitatif yang menguntungkan negara maju dan korporasi besar.

Kontroversi keterlibatan industri fosil dalam COP28 dengan lebih dari 2.000 pelobi dan CEO ADNOC sebagai presiden konferensi membuktikan bahwa kepentingan kapitalis masih mendominasi diplomasi iklim global. Tanpa perubahan struktural terhadap sistem ekonomi global, solusi yang dihasilkan akan tetap berpihak pada kelas kapitalis global sementara negara-negara berkembang hanya menjadi pelengkap dari agenda transisi yang ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik negara maju. Indonesia dan negara berkembang lainnya perlu memperkuat bargaining position melalui regulasi yang ketat, transfer teknologi genuine, dan reformasi arsitektur keuangan iklim global untuk mencapai transisi energi yang benar-benar adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Acen, C., Bamisile, O., Cai, D., Ukwuoma, C. C., Obiora, S., Huang, Q., Ozsahin, D. U., & Adun, H. (2024). The complementary role of carbon dioxide removal: A catalyst for advancing the COP28 pledges towards the 1.5 °C Paris Agreement target. *The Science of the Total Environment*, 947, 174302. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174302>
- Ahmed, Z., Shah, M. A., & Saleem, M. (2023). The Idea of Environment in Marxist Philosophy. *Academic Journal*, XI(4), pp. 1-15.
- Asif, M., Amin, N., Shabbir, M. S., & Song, A. (2024). Balancing growth and sustainability: COP 28 policy implications of green energy, industrialization, foreign direct investment, and globalization in South Asia. *Journal of Environmental Management*, 369, 122290. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122290>
- Bourzac, K. (2024). COP28 makes it official: Fossil fuels cause climate change. *Engineering*, 37, 3-5. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.05.001>
- Chopra, R., Rehman, M. A., Yadav, A., & Bhardwaj, S. (2024). Revisiting the EKC framework concerning COP-28 carbon neutrality management: Evidence from Top-5 carbon embittering countries. *Journal of Environmental Management*, 356, 120690. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120690>
- Centre for Climate Reporting. (2023). COP28 Documents Leak: ADNOC and Climate Negotiations. BBC News Partnership Investigation.
- Darby, S. J., Hammond, G. P., & Wu, J. (2024). Briefing: Stocktaking global warming: the outcomes of the 2023 Dubai Climate Summit (COP28). *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Energy*, 177(5), 193-204. <https://doi.org/10.1680/jener.24.00005>
- Ember Energy. (2024). Indonesia Energy Transition Outlook 2024. *Global Electricity Review*.
- Engels, F. (2007). The Part Played by Labor in the Transition from Ape to Man. In *The Origin of the Family, Private Property and the State*. New York: International Publishers.
- Hamilton, B., Vega, D., Kusdiana, D., Susandy, T., Szum, C., Levinson, R., et al., R. (2024). NET ZERO WORLD COP28 Outcomes Report. National Renewable Energy Laboratory.
- Institute for Energy Economics and Financial Analysis. (2024). The Dark Cloud Over Indonesia's Pledge to Achieve Net-Zero Emissions by 2060. IEEFA Report.
- Institute for Essential Services Reform. (2024). Indonesia Energy Transition Roadmap 2024. Jakarta: IESR.
- Insivia Partners. (2025). Looking at Climate Commitments after COP28 for Indonesia. Climate Policy Analysis Report.
- Indonesia secures climate collaborations at COP28, inking milestone agreements. (2023, December 4). *Indonesia Business Post*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033. Jakarta: Kementerian ESDM Republik Indonesia.
- Putri, G. N. E., Molasy, H. D., & Soelistijono, P. A. (2025). Penolakan Indonesia terhadap hasil kesepakatan Conference of the Parties (COP) 28. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2), pp. 123-145.
- Resosudarmo, B., Effendi, Y., & Rezki, J. (2023). Prospects of Energy Transition in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59, 149-177. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2238336>
- Situmorang, T., Amin, M., & Ritonga, A. (2025). Indonesia's policy responses to climate change in sustainable natural resource management: Jokowi's tenure. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1445. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1445/1/012063>
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2023). Joint Statement on Climate, Nature, and People - COP28 Outcomes. Dubai: UNFCCC.
- Williams, C. (2010). Marxism and the

- Environment. International Socialist
Review, Issue 72.
<https://isreview.org/issue/72/marxism-and-environment/>
- World Resources Institute. (2024). Indonesia Forest and Climate Update 2024. Jakarta: WRI Indonesia.
- Yu, H., Wen, B., Zahidi, I., Chow, M. F., Liang, D., & Madsen, D. Ø. (2024). The critical role of energy transition in addressing climate change at COP28. Results in Engineering, 22, 102324. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102324>